



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022**



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Isu-isu Strategis .....	1
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	2
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	13
2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2022 .....	13
2.4 Instrument Pendukung Capaian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	16
3.2 Realisasi Anggaran .....	23
3.3 Inovasi.....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	25
4.2 Rekomendasi .....	25
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja	
LRA	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan .....	5
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang .....	6
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan .....	6
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin .....	7
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana .....	7
Tabel 2.1 : Rencana Kinerja Jangka Menengah .....	12
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahunan .....	13
Tabel 2.3 : Arah Kebijakan .....	13
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja .....	14
Tabel 2.5 : Program dan Kegiatan .....	14
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja .....	17
Tabel 3.2 : Sasaran Strategis dan Indikator .....	17
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2022 .....	18
Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 – 2022 ...	19
Tabel 3.5 : Capaian Kinerja 2022 terhadap Target Akhir 2023 .....	20
Tabel 3.6 : Analisis Capaian Penyebab Keberhasilan 2022 .....	20
Tabel 3.7 : Analisis Efisiensi Capaian Sasaran Strategis 2022 .....	21
Tabel 3.8 : Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja 2022 .....	22
Tabel 3.9 : Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan 2022 .....	23

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Cascading Biro APBJ	3
Gambar 1.2 : Peta Proses Bisnis	4
Gambar 1.4 : Struktur Biro Kesejahteraan Rakyat	5
Gambar 2.1 : E Planing	15
Gambar 2.2 : E Bugting	15
Gambar 3.1 : Inovasi	15

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pergub 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2023  
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690512 199401 1 001

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Dalam rangka perwujudan good governance dan clean government itulah maka Biro Kesejahteraan Rakyat berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun teknis penyusunan dan implementasi SAKIP mengacu pada Permen-pan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Kesejahteraan Rakyat berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2 Isu-isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2022, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil

risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Strategis Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi kebijakan bidang pemerintahan;
2. Pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Jawa Tengah belum optimal;
3. Pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai kewenangan belum dilaksanakan secara optimal oleh Kabupaten Kota;
4. Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.

### **1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

#### **1. Mandat Kinerja**

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

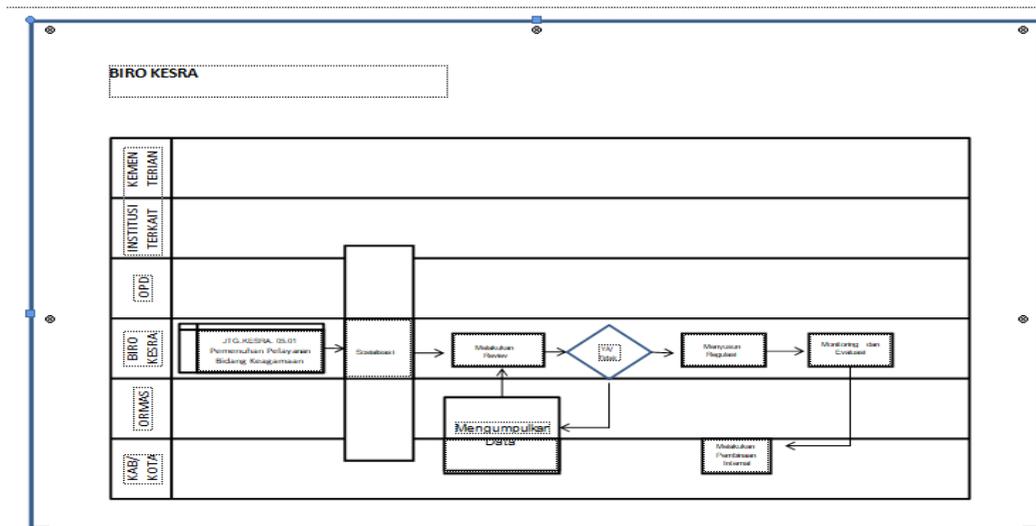
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Kesejahteraan Rakyat berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok **melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.**



## 2. Peta Bisnis



Gambar Peta Bisnis 1.2

## 3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Keagamaan, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama;
  - b. Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dikbudkesosnakertrans), terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (Dikbud dan Perpus);
  - b. Sub Bagian Kesehatan; dan
  - c. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans);
3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (Permas KB dan Pora), terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA Dalduk dan KB);
  - b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Permasdesdukcapi); dan
  - c. Sub bagian Kepemudaan dan Olahraga (Pora).

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

PERUBAHAN PADA PERGUB 70 TAHUN 2018



### 1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

#### 1. Susunan Kepegawaian :

Susunan Kepegawaian Biro Kesra SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

#### a. Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1.  
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Keagamaan	-	-	1	2	10	13
Bagian Pendidikan kebudayaan kesehatan sosial ketenaga kerjaan dan tramigrasi	-	-	-	4	7	11
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga				4	11	15
<b>Jumlah Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>40</b>

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Jumlah
Kepala Biro	1			
Bagian Keagamaan	3	9	1	13
Bagian Pendidikan kebudayaan kesehatan sosial ketenaga kerjaan dan tramigrasi	2	9	-	11
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	4	11	-	15
Jumlah Total	10	29	1	40

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Doktoral / S3	Pasca Sarjana	Sarjana/ D-4	Sarjana Muda	SMA/ SMK/ STM	SMP/ ST	Jml
Kepala Biro	-	1	-	-	-	-	1
Bagian Keagamaan		4	6	3			13
Bagian Pendidikan kebudayaan kesehatan sosial ketenaga kerjaan dan tramigrasi		4	7				11
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga		4	11				15
Jumlah Total		13	24	3	-	-	40

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4.  
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-
Bagian Keagamaan	6	7	13
Bagian Pendidikan kebudayaan kesehatan sosial ketenaga kerjaan dan tramigrasi	6	5	11
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	4	11	15
Jumlah Total	17	23	10

## 2. Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro Kesra SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5.  
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lemari Besi/Metal	10	Baik
2	Meubelair. Meja 1/2 Biro	4	Baik
3	Meubelair. Kursi Rapat	80	Baik
4	Alat Pendingin Lemari Es	1	Baik
5	Dispenser	7	Baik
6	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik
9	Kursi Rapat Kerja Eselon II	20	Baik
10	Almari Besi Kaca Sorong 2 Pintu	1	Baik
11	Pendingin Ruangan (AC)	7	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
12	Almari Besi Kaca Sorong 4 Pintu	1	Baik
13	Almari Besi 2 Pintu	1	Baik
17	Filling Cabinet	1	Baik
18	Meja Informasi	1	Baik
19	Meja Computer	13	Baik
20	Kursi Putar Manager	32	Baik
22	Kursi Tunggu Isi 4	1	Baik
23	Kursi rapat	1	Baik
24	LED TV 32 Inch	1	Baik
25	Printer Laserjet	1	Baik
26	Komputer PC	13	Baik
29	Laptop Acer	1	Baik
30	Laptop Lenovo 9220	2	Baik
31	Laptop HP Spectre X360 13-AP0055TU	6	Baik
32	Printer Brother	1	Baik
33	Proyektor	3	Baik
35	Kursi Kerja Eselon III dan IV	10	Baik
36	Kursi Eselon II	1	Baik
37	Printer Epson	1	Baik
38	Personal Komputer Desktop HP	5	Baik
39	Meja Kantor	1	Baik
40	Almari Pakaian	1	Baik
41	Printer DeskJet EPSON L3110	10	Baik
42	Laptop ACER Z3-451/8	3	Baik
43	Kursi Staf	20	Baik
44	Meja Komputer Orbitrend	10	Baik
45	Printer HP Laserjet Pro MFP M28A	6	Baik
46	Printer DeskJet EPSON L6160	1	Baik
47	Mobil Eselon	5	Baik
48	Sepeda Motor	2	Baik
49	Kamera	1	Baik
50	TV LED Samsung Flat Smart TV 65 INCH	2	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	[UA65RU7100]		
51	Portable AUDIO	1	Baik
52	Uninterruptable Power Supply	10	Baik
53	External Hardisk	2	Baik
54	Meja rapat	1	Baik
55	Sofa tamu	7	Baik
56	Kursi tamu	1	Baik

### 3. Anggaran

Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam upaya capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022 yaitu:

- a. Program "Kesejahteraan Rakyat", mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 431,427,610,000. (Empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah).
- b. Program "Administrasi Umum", mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 389,674,000 (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD**

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2019 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

##### **1. Visi**

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah

**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.**

##### **2. Misi**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, dijabarkan dalam empat misi, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI,
- b. **Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota,**
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Adapun secara khusus, peran utama Sekretariat Daerah yang eksistensinya berada dalam upaya meningkatkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka secara khusus dapat juga diartikan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi kedua yaitu: **Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota.**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
RPJMD 2018-2023  
Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah		Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
		Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	85	85	85	85
		Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	85	85	85	85
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	85	85	85	85

## 2.2 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan, sasaran dan program jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
RENJA 2022  
Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	40
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	90
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	90

Tabel 2.3 Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	optimalnya upaya peningkatan pembinaan mental masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngaji Bersama Gubernur/Wakil Gubernur (Jateng bersholawat) dan sarasehan</li> <li>2. Hibah Insentif pendidik keagamaan</li> <li>3. Hibah BOSDa MA Negeri dan Swasta</li> <li>4. Hibah pendidikan keagamaan (sarpras)</li> <li>5. Hibah keagamaan (sarana peribadatan)</li> </ol>
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<p>Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan</p> <p>Optimalisasi pengelolaan sistem</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM , pembinaan kelembagaan, dan advokasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah,</li> <li>2. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah,</li> <li>3. Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah,</li> <li>4. Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan</li> <li>5. Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.</li> </ol>

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berikut tabel perjanjian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat serta tabel Program dan Kegiatan Tahun 2022 :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan efektivitas pembangunan urusan pelayanan dasar	Persentase Capaian Kinerja program Bidang Pelayanan Dasar	%	90
2.	Meningkatkan efektivitas pembangunan urusan non pelayanan dasar	Persentase Capaian Kinerja program Bidang Non Pelayanan Dasar	%	90
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan	Persentase Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	%	40
4.	Terlaksananya Administrasi Umum dan Keuangan	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum dan Keuangan	%	100

Tabel 2.5  
Program dan Kegiatan

No.	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	90	429,862,610,000
		Persentase Capaian Kinerja program Bidang Pelayanan Dasar	90	765,000,000
		Persentase Capaian Kinerja program Bidang Non Pelayanan Dasar	40	800,000,000
	Administrasi Umum	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum dan Keuangan	100	389,674,000

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 (dua) Program yang didukung oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 431.817.284.000,- (empat ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

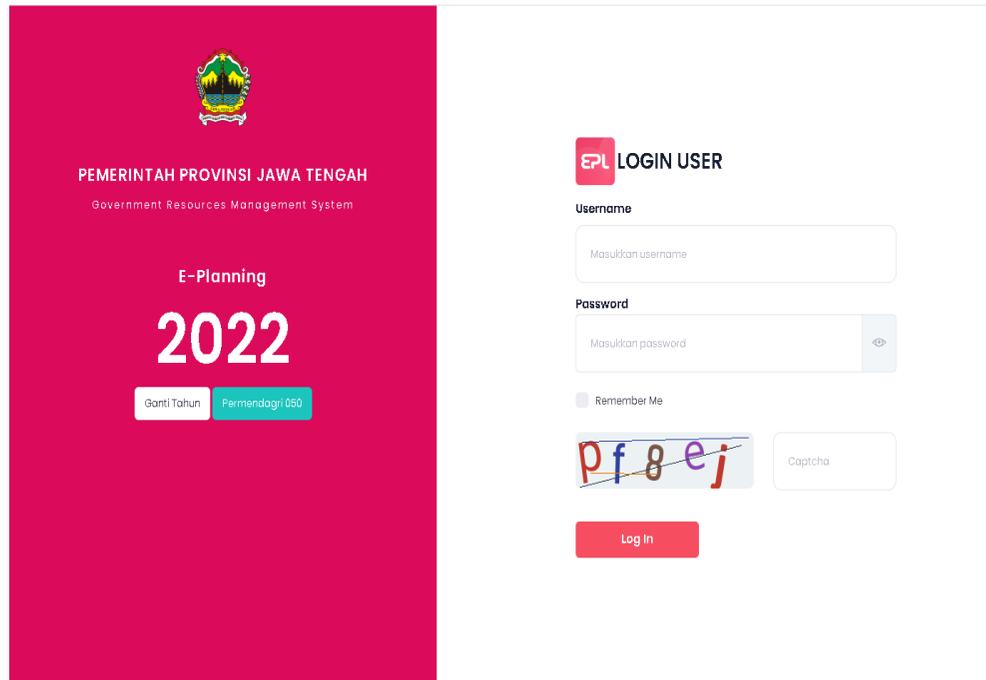
Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan didukung beberapa aplikasi pendukung yaitu:

### 1. Eplaning

#### Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilakukan secara On-Line

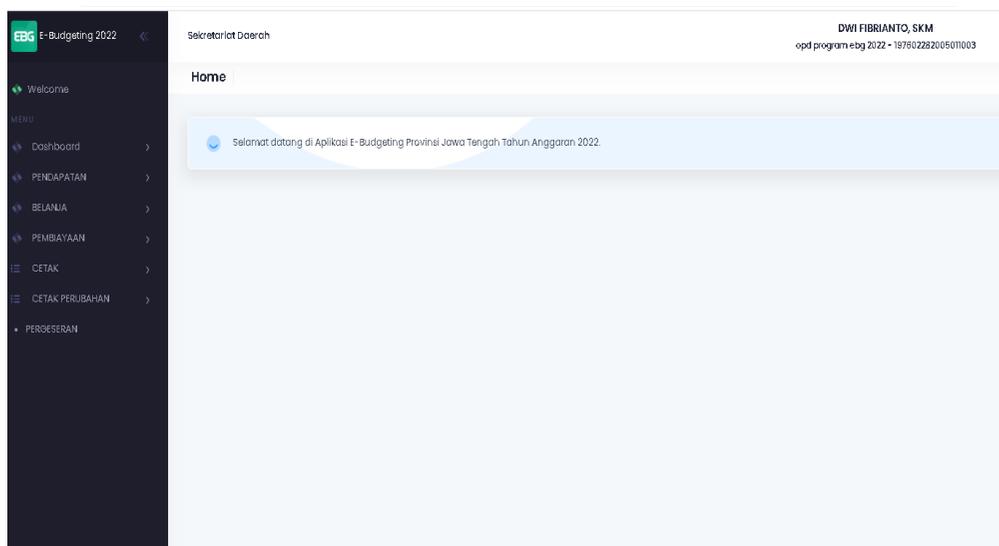
- b.** Database terintegrasi, data Perencanaan digunakan untuk data sistem yang Lain
- c.** Pengaturan Waktu Pertahapan, Sehingga Penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu
- d.** Pengawasan Serapan Anggaran Menjadi Lebih Mudah
- e.** Proses Perencanaan Menjadi Praktis dan Mudah
- f.** Mendukung Single Sign On (Satu Login untuk ke Beberapa Sistem)



## 2. E Bugting

### Fungsi :

- a.** Kontrol akan lebih mudah dilakukan
- b.** Kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan
- c.** Transparansi anggaran dapat ditingkatkan
- d.** Kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 adalah bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$Capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	>100%	Sangat Baik
2.	85 – 100%	Baik
3.	65– 84,99%	Cukup
4.	50 – 64,99%	Kurang
5.	<50,%	Sangat Kurang

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan strategik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pada tahun 2022, secara umum Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus diwujudkan yaitu:

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	42	39	97,5	42
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	90	90	100	90

		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	90	90	100	90
--	--	---	---	----	----	-----	----

Tahun 2022 ini adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	42	39	97,5	Baik	Biro Kesra
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	90	90	100	Baik	Biro Kesra
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	90	90	100	Baik	Biro Kesra

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan " pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 telah mencapai 97,5% dengan kategori Baik dari target 40% terealisasi 39%. Dan sasaran "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat" dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 telah mencapai 100% dengan kategori Baik dari target 90% terealisasi 90%.

3. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 - 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	80	80,65	100,81	85	87,1	102,47	40	39	97,5
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	70	70	100	85	87,88	103,39	90	90	100
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	80	83,33	104,16	85	81,25	95,59	90	90	100

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis pertama "Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan " pada Biro SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 terhadap pencapaian tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap dampak Pandemi Covid-19 tetapi seluruhnya menunjukkan konsistensi hasil yang sama yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis ke dua "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat" dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi pada Biro SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 terhadap pencapaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan, walaupun adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap dampak Pandemi Covid-19 tetapi seluruhnya menunjukkan konsistensi hasil yang sama yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya.

**4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja 2022 terhadap Target Akhir 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	97,5	42	Baik
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	90	
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100	90	

Capaian kinerja sasaran strategis Pertama “Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah” dengan indikator kinerja “Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan ” pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 terhadap target akhir 2023 telah tercapai sebesar 97,5% dengan tingkat kemajuan Baik. Capaian kinerja sasaran strategis kedua “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja “Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat” dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 terhadap target akhir 2023 telah tercapai sebesar 100% dengan tingkat kemajuan Baik.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Tabel 3.6 Analisis Capaian Penyebab Keberhasilan 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	42	39	97,5	Faktor Pendorong Kegagalan: Adanya Lembaga tidak melengkapi proposal, Terjadi duplikasi dan pernah menerima hibah ditahun sebelumnya, Selisih standarisasi / hasil kajian tim verifikasi, Tidak melengkapi berkas pencairan dan salah bidang hibah	Sosialisasi pelaksanaan hibah

Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	90	90	100	Faktor Pendorong Keberhasilan: Semakin tertibnya SKPD dalam melaksanakan kegiatan.	
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	90	90	100	Faktor Pendorong Keberhasilan: Semakin tertibnya SKPD dalam melaksanakan kegiatan	

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Capaian Sasaran Strategis 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	40	39	97,5	429,862,610,000	421,190,463,203	97.98	2,02
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90	90	100	765,000,000	731,608,646	95.64	4,36
		90	90	100	800,000,000	794,859,541	99.36	0,64

Dalam upaya capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah", Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 429,862,610,000,- (Empat ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 421,190,463,203,- atau terserap 97.98%. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,02% dari dukungan anggaran yang diterima. Untuk sasaran kedua kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah pada indikator Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 765,000,000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

731,608,646,- atau terserap 95.64%. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,36% . Pada indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 800,000,000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 794,859,541,- atau terserap 99.36%. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,64%

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	97,5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100	Menunjang
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	menunjang
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100	menunjang
				Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	100	menunjang

Dalam menunjang pencapaian sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 (dua) Program dan 4 (empat) Indikator. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, tahun 2022 ini Biro Kesejahteraan Rakyat

SETDA Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran strategis suatu organisasi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Oleh karena itu sistem perencanaan dan penganggaran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Hal ini karena dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tentu saja memerlukan anggaran meskipun tidak selalu. Oleh karena itu perlu dievaluasi penggunaan anggaran apakah sudah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan 2022

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		
			S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI	
			Rp	%		Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>389,674,000</b>	<b>389,674,000</b>	100	<b>27,794,505</b>	<b>387,102,807</b>	<b>99.34</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>389,674,000</b>	<b>389,674,000</b>	100	<b>27,794,505</b>	<b>387,102,807</b>	<b>99.34</b>
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,000,000	320,000,000	100	14,707,500	318,760,967	99.61
2	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	69,674,000	69,674,000	100	13,087,005	68,341,840	98.09
	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>431,427,610,000</b>	<b>431,427,610,000</b>	100	<b>49,365,678,921</b>	<b>422,716,931,390</b>	<b>97.98</b>
	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>429,862,610,000</b>	<b>429,862,610,000</b>	100	<b>49,058,834,580</b>	<b>421,190,463,203</b>	<b>97.98</b>
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	429,062,610,000	429,062,610,000	100	48,973,624,160	420,403,482,368	97.98
2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	800,000,000	800,000,000	100	85,210,420	786,980,835	98.37
	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>765,000,000</b>	<b>765,000,000</b>	100	<b>113,685,671</b>	<b>731,608,646</b>	<b>95.64</b>
1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	250,000,000	250,000,000	100	54,302,600	243,314,985	97.33
2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	300,000,000	300,000,000	100	38,237,500	277,070,591	92.36
3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	215,000,000	215,000,000	100	211,223,070	479.660.970	99,93
	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Non Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>800,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	100	<b>193,158,670</b>	<b>794,859,541</b>	<b>99.36</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	195,000,000	195,000,000	100	19,243,050	192,253,119	98.59
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	605,000,000	605,000,000	100	173,915,620	602,606,422	99.60
	Jumlah Total	431,817,284,000	373,710,560,771	100	49,393,473,426	423,104,034,197	97.98

### 3.3 INOVASI

Untuk mengetahui kontribusi dan peran CSR perusahaan dalam pembangunan daerah di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun Sistem Pelaporan Online CSR "SiLap CSR" untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan program/kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di Jawa Tengah, yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Maret 2021. Dengan adanya aplikasi SiLap CSR tersebut, diharapkan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan CSR oleh perusahaan makin efektif dan efisien, dan kontribusi CSR bagi pembangunan daerah di Jawa Tengah makin meningkat. Pelaporan melalui Silap CSR dilakukan oleh perusahaan dengan menyebutkan kegiatan, output, nominal, waktu, lokasi serta keterangan yang perlu disampaikan terkait kegiatan CSR yang sudah dilakukan. Kegiatan CSR dibagi menjadi 12 (dua belas) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga Seni Budaya dan Pariwisata, Kesejahteraan Sosial, Usaha Ekonomi Rakyat, Keagamaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertanian Perkebunan Kehutanan Peternakan Kelautan dan Perikanan, Energi Baru Terbarukan, Kedaruratan, Pendampingan Umum dan Infrastruktur.



**Gambar Silap CSR 3.1**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa secara umum Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1(satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori "Baik". Hal ini didukung dengan data yaitu Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Meningkatkan sinergi kebijakan daerah" telah tercapai 99,16% dengan kategori "Baik".

#### **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa kondisi tersebut tidak membuat kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat memburuk, namun sebagai pendorong untuk lebih baik lagi dalam pencapaian target kinerja kedepan. Maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja ditahun yang akan datang pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah
2. Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas
3. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan kegiatan yang akan dicapai.
4. Pemenuhan Sarana dan Prasana Pendukung Kinerja Proses Biro Kesejahteraan Rakyat

5. Merencanakan kegiatan sesuai dengan isu strategis dan kondisi saat ini sehingga mencapai target kinerja keuangan dapat terpenuhi.
6. Perlunya sosialisasi, evaluasi dan koordinasi terkait syarat- syarat pengajuan hibah, standarisasi pada penerimaan Hibah, Penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan.

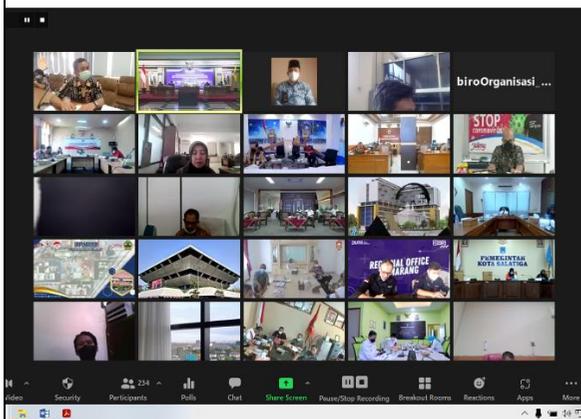
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, Januari 2023  
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

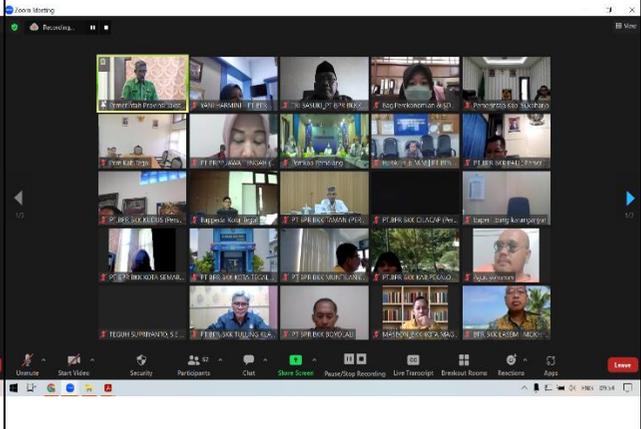


Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690512 199401 1 001

# LAMPIRAN



Dokumentasi Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2021  
Dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2022  
Serta Replikasi Program Desa/Kelurahan Dampingan Di 35 Kabupaten/Kota



Dokumentasi Penghargaan CSR Award Tahun 2022  
Dan Rapat Koordinasi TJSPL Provinsi Jawa Tengah  
Selasa, 13 Desember 2022





Pelaksanaan Jateng Besholawat Pramuka di Lapangan Kab Tegal  
30 Agustus 2022



Jateng Bersholawat dalam Penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an(MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2022





Pelaksanaan Mudik Gratis Ke Jawa Tengah

